

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfiansyah, 2012, *Syari'at Islam, Politik, dan Perempuan di Aceh*, Arraniry Press, Banda Aceh.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Azhary, Tahir, 2007, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- _____, et al., 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H.*, Kencana, Jakarta.
- Bahri, Samsul, (ed.) 2011, *Problematisasi Hukum Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.
- Din, Mohd, 2009, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Unpad Press, Bandung.
- Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.
- El-Muhtaj, Mahda, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Indrayana, Denny, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Kompas, Jakarta.
- _____, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Isa, Abdul Gani, 2013, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Penerbit PeNA, Banda Aceh.
- Muladi, (ed.) 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Rijal, Syamsul, (ed.) 2007, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.



- Riyanto, Astim, 2006, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudirman, A.A., (ed.) 2011, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Jakarta.
- Tim UB Press, 2012, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB Press, Malang.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Hamid, Abdul, 2012, "Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan", *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Suganda, Delfi, 2012, "Pancasila dan Syari'ah Islam sebagai Asas-Asas Pembentukan Qanun di NAD: Studi Kasus Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam", *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Azzubaili, 2014, "Harmonisasi Implementasi Antara Qanun Khalwat dengan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat: Suatu Penelitian di Kab. Bireuen", *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Junaidi, Muhammad, 2016, "Memorie Van Teolichting Pembahasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", Biro Hukum Setda Aceh, Banda Aceh, Tidak dipublikasikan.

Pidato

- Rani, Faisal A, "Formalisasi Prinsip dan Syari'at Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 9 April 2011.

Artikel Jurnal/Artikel Internet

- Danial, "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial: Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh", *Analisis*, Vol. XII, No. 1, Juni 2012.
- Mahdi, "Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh", *Media Syariah*, Vol. XIII, No. 2, Juli-Desember 2011.
- Saputra, Jummaidi, *et al.*, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melanggar Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah*, Vol. 2, No. 2, November 2013.
- Syahputra, Azmi, "Kontroversi Hak Asasi Manusia Antara Paham Universal dan Partikular", *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011.
- <http://regional.kompas.com/read/2016/04/15/06330061/Kejari.Takengon.Hukuman.Cambuk.Bagi.Non-Muslim.Diatur.Qanun>, diakses 27 Agustus 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah>, diakses 4 Januari 2017.



http://www.hukumonline.com/berita/baca/prof-faisal-a-rany--brnon-muslim-bisa-tunduk-pada-qanun_, diakses 2 Agustus 2016.

Peraturan Perundang-undangan/Dokumen Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66).



Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VI/2008.

Risalah Sidang Pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI, diakses 19 September 2016.